



KEPALA DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MEKARSARI
KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 01 Tahun 2021

TENTANG :
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir semua kegiatan masyarakat Desa Mekarsari yang bersifat sosial, budaya perlu diatur berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal bersekala desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 dan pasal 19, Desa mempunyai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 219/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Tansfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Mengahdapi Ancaman Yang Mebahayakan Perekonomian

Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1641);
23. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
24. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor : 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
25. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
26. Instruksi Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 Tanggal 05 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
27. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
28. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
29. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 443/0619/BPD Tanggal 10 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikri dan Penjelasan Posko Penanganan *Corona Virue Disease 2019 (COVID-19)* di Tingkat Desa;
30. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-3/PK/2021 Tanggal 11 Februari 2021 tentang Penegasan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
34. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020

Nomor 73);

35. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
36. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
37. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
38. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
39. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
40. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
41. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
42. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2019 Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 34);
43. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 39);
44. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 56);
45. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
46. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
47. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201 Nomor 02);
48. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
49. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
50. Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 978.4/KEP. 13-DPMD/2021 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021;
51. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 900/Kep.9-Barjas/2020 tentang Bentuk-bentuk Formulir Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Desa;
52. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 04 Tahun 2020 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
Desa Mekarsari Tahun 2020 - 2026
53. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Mekarsari Tahun 2020.
 54. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 55. Peraturan Desa Mekarsari Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARSARI

dan

KEPALA DESA MEKARSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARSARI KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSEKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Cianjur ;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Cianjur dalam wilayah kerja pemerintah kabupaten Cianjur;
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

- adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang merupakan mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat;
 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, Kewenangan yang tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat ;
 17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat;

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Desa ini, meliputi

- 1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Mekanisme pelaksanaan Kewenangan Desa;
- 4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa;
- 5) Pendanaan;
- 6) Pungutan Desa, dan;
- 7) Pembinaan dan pengawasan

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas :

- 1) Sistem organisasi masyarakat Desa;
- 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat Desa;
- 3) Pembinaan lembaga dan hukum adat;

- 4) Pengelolaan tanah kas Desa;
- 5) Pengembangan peran masyarakat Desa;

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah ;

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa;
 - a. Penjaga balai Desa;
 - b. Pengelolaan tanah carik Desa;
 - c. Pengelolaan tanah-tanah kas Desa;
 - d. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 - e. Penataan dan pemetaan tata guna lahan;
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - a. Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, bakti sosial;
 - b. Bersih makam;
 - c. Pemeliharaan sarana ibadah (masjid dan madrasah);
 - d. Pemeliharaan saluran air;
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - a. Pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug Desa, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. Pembinaan shodaqoh dan tradisi;
 - c. Pembinaan sistem keamanan lingkungan;
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
 - a. Pelestarian adat di Desa, seperti muludan, rajaban, Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), sya'banan, nyamungan;
 - b. Pelestarian budaya seperti sholawatan, pengajian sahrियahan, marhabaan, tahlilan, nasyid, marawis, wayangan, pencak silat, calung, upacara adat pernikahan dan khitanan;
 - c. Syukuran sebelum dan sesudah panen;
 - d. Menyantuni fakir miskin, yatim piatu, jompo;
 - e. Perayaan Agustusan;

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas:

- 1) Tambatan perahu
- 2) Pengelolaan pasar Desa;
- 3) Pengelolaan tempat pemandian umum;
- 4) Pengelolaan jaringan irigasi;
- 5) Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
- 6) Pembinaan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- 7) Pengembangan dan pembinaan snggar seni dan belajar;
- 8) Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- 9) Pengelolaan embung Desa;
- 10) Pengelolaan air minum berskala Desa;
- 11) Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian;

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi yang meliputi bidang

penyelenggaraan pemerintah Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa adalah :

- 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat;
- 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) Drainase;
- 4) Tandon air bersih atau penampungan air hujan bersama;
- 5) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk;
- 6) Selokan;
- 7) Tempat pembuangan sampah;
- 8) Gerobak sampah;
- 9) Jalan pemukiman;
- 10) Jalan Desa antara pemukiman kewilayah pertanian;
- 11) Jalan poros Desa;
- 12) Jembatan Desa;
- 13) Goron-gorong;
- 14) Terminal Desa;
- 15) Pembangkit listrik tenaga diesel;
- 16) Pembangkit listrik tenaga matahari;
- 17) Jaringan distribusi tenaga listrik;
- 18) Jaringan internet untuk warga Desa;
- 19) Website Desa;
- 20) Peralatan pengeras suara (loudspeaker);
- 21) Radio single side band (SSB);
- 22) Air bersih berskala Desa;
- 23) Sanitasi lingkungan;
- 24) Jambanisasi;
- 25) Mandi, cuci, kakus (MCK);
- 26) Mobil / kapal motor untuk ambulance Desa;
- 27) Lat bantu penyandang disabilitas;
- 28) Balai pengobatan;
- 29) Posyandu;
- 30) Poskesdes/polindes;
- 31) Taman bacaan masyarakat;
- 32) Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 33) Wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
- 34) Taman belajar keagamaan;
- 35) Bangunan perpustakaan Desa;
- 36) Buku/ Bahan bacaan;
- 37) Balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat;
- 38) Sanggar seni;
- 39) Peralatan kesenian;
- 40) Bendungan berskala kecil;
- 41) Pembanguna atau perbaikan embung;
- 42) Irigasi Desa;
- 43) Percetakan lahan pertanian;
- 44) Kandang ternak;
- 45) Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian;
- 46) Lumbung Desa;
- 47) Mesin jahit;
- 48) Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 49) Pasar Desa;
- 50) Gudang barang;
- 51) Panggung hiburan;
- 52) Wahana permainan anak;
- 53) Taman rekreasi;
- 54) Pompa air;
- 55) Kolam untuk mata air;
- 56) Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- 57) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;

- 58) Penyediaan air bersih;
- 59) Pelayanan kesehatan lingkungan;
- 60) Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes melitus dan gangguan jiwa;
- 61) Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- 62) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 63) Kampanye dan promosi hak-hak anak, kecerdasan, pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- 64) Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 65) Perawatan kesehatan dan / atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- 66) Pengobatan untuk lansia;
- 67) Keluarga berencana;
- 68) Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 69) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- 70) Pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman;
- 71) Bantuan insentif guru PAUD;
- 72) Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- 73) Penyelenggaraan pelatihan kerja;
- 74) Bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- 75) Pengelolaan lingkungan pemukiman;
- 76) Sistem informasi Desa;
- 77) Pembibitan tanaman pangan;
- 78) Pembibitan tanaman keras;
- 79) Pengadaan pupuk;
- 80) Pengelolaan usaha hutan Desa;
- 81) Pengadaan bibit/induk ternak;
- 82) Pengolahan gula aren;
- 83) Produksi anyaman bambu;
- 84) Produksi pandai besi;
- 85) Pengelolaan usaha alat rumah tangga
- 86) Penyertaan modal BUM Desa;
- 87) Penguatan permodalan BUM Desa;
- 88) Pengembangan BUM Desa;
- 89) Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
- 90) Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
- 91) Pengembangan hutan tanaman rakyat;
- 92) Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- 93) Pengembangan, pelatihan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- 94) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dan tenaga sukarelawan dalam menghadapi bencana;
- 95) Reboisasi;
- 96) Penyusunan arah pengembangan Desa;
- 97) Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa;
- 98) Pendataan potensi dan aset Desa;
- 99) Penyusunan profil Desa data Desa;
- 100) Penyusunan peta aset Desa;
- 101) Pendataan penduduk Desa;
- 102) Sosialisasi penggunaan anggaran APBDesa;
- 103) Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
- 104) Pemberian bantuan kepada warga miskin, yatim piatu, jompo, dan anak terlantar;
- 105) Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
- 106) Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
- 107) Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis

- masyarakat;
- 108) Penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - 109) Pelatihan kerja dan kewirausahaan;
 - 110) Pengembangan, pelatihan hukum dan para legal Desa untuk penyelesaian masalah;
 - 111) Penataan dusun;
 - 112) Pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - 113) Pengelolaan lahan kritis skala Desa;
 - 114) Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Desa;
 - 115) Pembinaan dan pelatihan organisasi kepemudaan di tingkat Desa;
 - 116) Peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga Desa lainnya;
 - 117) Penyuluhan program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
 - 118) Pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum;
 - 119) Pengembangan ketahanan keluarga;
 - 120) Pendidikan ahlakul karimah dan keluarga sakinah;

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- 1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan;
- 2) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membuat Berita Acara penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan ketua BPD, serta diketahui oleh Camat atas nama Bupati;

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- 1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang;
- 2) Kepala Desa melaporkan kepada Camat atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa;
- 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan;

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan untuk realisasi dalam hal pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan pemberian bantuan atas pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6, dan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

BAB VII

PUNGUTAN DESA

Pasal 10

- 1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka pelaksanaan peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- 2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa;
- 3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- 4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk melalui APBDesa;

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- 1) Camat atas nama Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa;
- 2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi.
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
 - c. Monitoring dan evaluasi.
 - d. Dukungan teknis administrasi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di Mekarsari
pada tanggal 22 Januari 2021

Kepala DESA MEKARSARI

AYU JANA, S.IP

Diundangkan di Mekarsari
pada tanggal 22 Januari 2021

Sekretaris DESA MEKARSARI

USEP SUWANDI, S.IP

LEMBARAN DESA MEKARSARI TAHUN 01 Tahun 2021